

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang kajian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”, yaitu pendidikan berbasis nilai (Daryono, 2008: 13), artinya suatu usaha sadar untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak didik sehingga anak bisa bersikap dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai moral tersebut. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Budimansyah (2009) bahwa kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dibangun atas dasar, sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirancang untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang didasarkan pada nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai kepribadian dan pedoman perilaku masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Maftuh dan Sapriya (2005: 320), menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai berikut:

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

..... agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yaitu warga yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya tujuan penting dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah untuk membentuk karakter warga negara yang baik. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus dimuat dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dengan merujuk pada *Center for Civic Education* (1994: 45-56) yang merumuskan komponen utama kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Winataputra dan Budimansyah (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 19) menyatakan bahwa:

Warganegara yang baik harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Sejalan dengan pendapat di atas, Branson (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 185-186) mengemukakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan, sebagai berikut:

1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu.
2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris.
3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu.
4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menghasilkan kompetensi kewarganegaraan yang memberikan bekal menuju “*to be a good citizens*” (warga negara yang baik). Dengan demikian, kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan di sekolah, masyarakat serta bangsa dan negara.

Hasil penelitian lapangan yang mendukung, diantaranya dari hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Hilham Kurniadi (2010) ditemukan bahwa kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa SMA di Kabupaten Bangka Tengah, berturut-turut mempunyai frekuensi tertinggi dengan persentase 55,9% berkategori sedang/cukup, persentase 75,3% berkategori rendah, dan persentase 81,7% berkategori tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kewarganegaraan dapat mempengaruhi upaya peningkatan partisipasi politik siswa SMA. Begitu pula dalam penelitian ini, siswa akselerasi sebagai subjek penelitian, sejauhmana hubungan antar kompetensi kewarganegaraan siswa akselerasi tersebut.

Akselerasi merupakan program pendidikan yang memiliki komponen kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) yang sesuai dengan tujuan program akselerasi (Akbar, 2006: 121), diantaranya:

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Memberikan layanan pendidikan kepada anak berbakat akademik untuk mewujudkan bakat dan kemampuannya secara optimal.
2. Mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar siswa secara lebih komprehensif dan optimal.
3. Mengembangkan kreativitas siswa secara optimal.

Sedangkan dalam program akselerasi, watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dilihat dari sikap siswa, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, kepedulian, kesopanan, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, keterbukaan pikiran.

Akselerasi merupakan program pendidikan di SMA yang siswanya mempunyai bakat akademik yang tinggi dengan pembelajarannya lebih cepat dari pembelajaran biasa (reguler) sehingga masa studinya dapat mencapai dalam waktu dua tahun. Sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (4), menyatakan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Selain itu, tercantum pada Pasal 32 ayat (1), disebutkan bahwa:

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Edi Suprpto (2008) bahwa pada tahun 1998/1999, dua sekolah swasta di DKI Jakarta dan satu sekolah swasta di Jawa Barat melakukan uji coba pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk program percepatan belajar (akselerasi), yang mendapat arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Menengah. Pada tahun 2000, program dimaksud dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada Rakernas Depdiknas menjadi program pendidikan nasional. Pada kesempatan tersebut, Mendiknas melalui Dirjen Dikdasmen menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Sekolah Penyelenggara Program Percepatan Belajar kepada sebelas sekolah, yaitu 1 (satu) SD, 5 (lima) SMP, dan 5 (lima) SMA di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian, pada tahun pelajaran 2001/2002 diputuskan penetapan kebijakan pendiseminasian program percepatan belajar pada beberapa sekolah di beberapa provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Popon Erlina (Pricillia, 2009: 37) mengenai ditemukan bahwa siswa akselerasi memiliki perilaku kognitif (daya tangkap cepat, mudah, dan cepat menyelesaikan masalah serta berpikir kritis), kreatif (rasa ingin tahu, imajinatif, tertantang, berani mengambil resiko, keaktifan dan keterlibatan siswa dalam belajar), keterikatan tugas (tekun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, keteguhan, dan daya juang), kecerdasan emosi (pemahaman diri sendiri, pemahaman orang lain, pengendalian diri, kemandirian, penyesuaian diri, harkat diri, dan budi pekerti yang baik) serta kecerdasan spiritual yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya program akselerasi yang diselenggarakan oleh pemerintah agar siswa yang memiliki prestasi tinggi dapat terlayani dengan baik sehingga potensi yang dimilikinya dapat tersalur atau berkembang secara optimal, baik di tingkat SMP maupun SMA.

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Refleksi dari program akselerasi di negara Australia, berdasarkan hasil kunjungan ke *Glenunga International High School* (GIHS) sebagaimana yang diungkapkan oleh Budimansyah (2011) dalam tulisan yang berjudul “*Ignite Program*” atau program akselerasi menyatakan bahwa:

Glenunga International High School (GIHS) merupakan salah satu dari tiga sekolah internasional yang ada di Australia yang menyelenggarakan *ignite program* atau di negara Indonesia dikenal sebagai kelas akselerasi. Siswa pada kelas akselerasi (*ignite class*) semuanya *gifted student* yang dapat menyelesaikan kelas 8, 9, dan 10 hanya dalam waktu dua tahun saja. Konsep belajar di GIHS adalah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan membina *student wellbeing* sehingga setiap pelajaran selalu mengutamakan pendekatan inkuiri dimana guru bertindak sebagai fasilitator dan mitra belajar. Paling lama sepuluh menit guru memberi penjelasan awal tentang konsep yang akan dibahas. Selanjutnya, para siswa bekerja, baik secara individual maupun kelompok untuk menggali lebih dalam lagi konsep tersebut beserta aplikasinya dalam kehidupan dibawah bimbingan guru.

Program akselerasi tersebut hampir sama dengan penyelenggaraan program akselerasi yang terdapat di Indonesia, seperti di SMA Negeri 3 Bandung yang telah menyelenggarakan program akselerasi sejak tahun pelajaran 2002/2003. Kelas akselerasi dengan kelas reguler di sekolah tersebut sangat berbeda. Kelas akselerasi adalah kelas yang kemampuan dan prestasi siswanya lebih tinggi, biasanya menempuh pendidikannya dua tahun.

Berdasarkan hasil pengamatan di SMA Negeri 3 Bandung, jumlah siswa di kelas akselerasi lebih sedikit, yaitu 19 orang. Proses pembelajaran bagi siswa, baik di kelas akselerasi maupun di kelas reguler, intinya sama, yaitu menggunakan kurikulum nasional dengan jenis dan jumlah mata pelajaran yang sama. Akan tetapi, yang membedakannya, yaitu cara guru mengajar. Di kelas akselerasi, para guru benar-benar memosisikan dirinya sebagai fasilitator. Guru

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sebagai fasilitator di kelas akselerasi, yaitu memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa, seperti mengadakan praktikum di luar kelas.

Secara kognitif, siswa akselerasi mempunyai tingkat intelektual yang tinggi, tetapi berbagai pengalaman sosial sebaya kurang dialami oleh siswa akselerasi karena mengingat beban pelajarannya lebih berat dari siswa reguler, waktu belajarnya lebih lama karena tidak hanya terikat pada waktu jam sekolah sehingga mereka kekurangan waktu beraktivitas maupun berkomunikasi dengan teman sebayanya. Akan tetapi, waktu belajar siswa akselerasi dapat melakukannya di luar jam sekolah terutama kegiatan praktikum. Tujuan waktu belajarnya lama dari kelas reguler sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam aspek psikomotorik.

Tidak heran bila siswa akselerasi belajar lebih cepat daripada siswa di kelas reguler karena di kelas akselerasi guru hanya bertugas menyampaikan materi pokok saja sehingga materi yang disampaikan tidak diulang-ulang lagi ke siswa. Untuk selanjutnya, siswa yang harus aktif mencari dan melakukan berbagai eksperimen. Akan tetapi, hal tersebut dapat membuat siswa merasa tertekan dan mempunyai beban karena dituntut untuk terus belajar.

Selain itu, kelas akselerasi lebih terlihat eksklusif dan membuat siswanya merasa lebih dibandingkan dengan siswa reguler karena guru lebih memperhatikan siswa akselerasi dari aspek kognitif (pemikirannya), kesehatan maupun fisik siswanya sehingga kadangkala adanya kecemburuan sosial diantara siswa yang lain.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di kelas akselerasi tersebut, maka setiap siswa diharapkan memiliki kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) agar dapat memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi secara berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berusaha mengungkapkan sejauhmana hubungan antar kompetensi kewarganegaraan siswa kelas akselerasi, maka peneliti mencoba untuk mengetahui jawabannya melalui suatu penelitian yang berjudul "KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN SISWA KELAS AKSELERASI (STUDI PADA SMA NEGERI 3 BANDUNG)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji adalah tentang "bagaimana kompetensi kewarganegaraan siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung?".

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian masalah pokok tersebut, maka peneliti mengidentifikasikan dalam beberapa sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung?
2. Sejauhmana korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dengan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung?

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3. Seauhmana korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung?
4. Seauhmana korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Sesuai dengan rumusan permasalahan, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kompetensi kewarganegaraan siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.
- b. Mengetahui korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dengan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.
- c. Mengetahui korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- d. Mengetahui korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh informasi dan data mengenai kompetensi kewarganegaraan siswa kelas akselerasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru yang akan berguna bagi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang kompetensi kewarganegaraan siswa.

2. Secara praktis

a. Bagi siswa

- 1) Mengembangkan kepribadian dan wawasan berpikir kritis.
- 2) Meningkatkan aktivitas pembelajaran dengan mengutamakan kompetensi siswa akselerasi.
- 3) Sebagai motivasi untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan siswa di kelas.

b. Bagi guru

- 1) Mengembangkan inovasi dalam menggunakan metode pembelajaran di kelas akselerasi agar proses pembelajaran berjalan efektif dengan memperhatikan kompetensi kewarganegaraan siswa.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan dalam kompetensi kewarganegaraan siswa sesuai dengan program pendidikan akselerasi.
 - 3) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang memenuhi standar pendidikan nasional dalam mengelola pembelajaran di kelas akselerasi.
- c. Bagi sekolah
- 1) Sebagai motivasi untuk lebih mengembangkan pengetahuan tentang kompetensi kewarganegaraan siswa kelas akselerasi dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing.
 - 2) Sebagai bahan pertimbangan bagi peningkatan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan mengutamakan kompetensi kewarganegaraan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
 - 3) Sebagai upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan siswa kelas akselerasi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan agar tidak terjadi salah pengertian dan untuk memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul penelitian ini, perlu kiranya diberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam judul penelitian tersebut.

1. Kompetensi

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam pengertian yang lebih konseptual, McAsham (Komalasari, 2008: 53) merumuskan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk dapat belajar dan berkembang, yang menjadi bagian dari dirinya atau sejauh mana ia dapat melakukan aspek kognitif, afektif, dan perilaku psikomotoriknya.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dikuasai dan dimiliki seorang siswa.

2. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (Darmadi, 2010: 8) adalah anggota dalam sebuah komunitas (negara) dan membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam *“The Social Science Encyclopedia”* oleh Kuper dan Kuper (Munandar, 2008: 109) disebutkan bahwa kewarganegaraan adalah status legal yang diatur oleh masing-masing negara keanggotaan dari suatu komunitas.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan adalah status legal atau anggota dalam sebuah negara ditujukan untuk kepentingan warga negara.

3. Akselerasi

Secara konseptual, Pressey (Akbar, 2006: 31) menyatakan bahwa akselerasi sebagai suatu kemajuan yang diperoleh dalam program pengajaran, pada waktu yang lebih cepat atau usia yang lebih muda daripada konvensional.

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akselerasi adalah program percepatan belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan dan prestasi tinggi untuk dapat menyelesaikan masa studinya dalam waktu dua tahun sehingga lebih cepat dari siswa yang berada di kelas reguler.

4. Pendidikan Kewarganegaraan

Cogan (Budimansyah dan Suryadi, 2008: 5) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran di persekolahan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang berperan aktif, partisipatif, kritis yang juga dibekali dengan kegiatan di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi kegiatan siswa.

F. Anggapan Dasar

Menurut Surakhmad (Arikunto, 2002: 58) menyatakan bahwa anggapan dasar adalah sebuah titik tolak yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Berdasarkan pendapat tersebut, anggapan dasar dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Setiap cara yang digunakan dalam pelajaran untuk mencapai kompetensi adalah mengembangkan manusia yang bermutu dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dinyatakan (Khoiru, dkk., 2011: 128).
2. Status kewarganegaraan seseorang berdasarkan pedoman atau peraturan perundangan yang berlaku (Nurmalina dan Syaifullah, 2008: 6).
3. Penyelenggaraan akselerasi untuk memberi kesempatan kepada siswa agar dapat menyelesaikan program pendidikan di SMA lebih cepat dalam waktu dua tahun. Selain itu, mengembangkan kemampuan berpikir dan bernalar siswa secara lebih komprehensif dan optimal serta mengembangkan kreativitas siswa secara optimal (Akbar, 2006: 121).
4. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart and good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Rahmat, dkk., 2009: 6).

G. Hipotesis

Dalam suatu penelitian diperlukan hipotesis untuk memperjelas arah pengujian terhadap masalah yang diteliti. Sugiyono (2011: 64) merumuskan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dimana

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Siswa kelas akselerasi pada SMA Negeri 3 Bandung memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang baik.
2. Terdapat korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dengan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.
3. Terdapat korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dengan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.
4. Terdapat korelasi antara pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung.

H. Variabel Penelitian

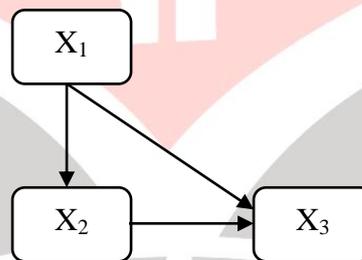
Variabel diperlukan sebagai sasaran atau objek yang menjadi fokus perhatian peneliti. Sugiyono (2011: 38) merumuskan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan (Sugiyono, 2011: 39), yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat disebut variabel bebas

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

atau *independent variable*. Sedangkan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas disebut variabel terikat atau *dependent variable*.

Masalah yang akan diteliti terdiri atas X_1 merupakan variabel bebas atau *independent variable* (eksogen) dari X_2 dan X_3 . X_1 mempunyai jalur hubungan langsung dengan X_3 . Dalam penelitian ini, X_2 dan X_3 merupakan variabel terikat atau *dependent variable* (endogen). Kemudian akan diteliti sejauhmana hubungan antar kompetensi kewarganegaraan tersebut, yaitu *civic knowledge* (X_1), *civic skill* (X_2), dan *civic disposition* (X_3). Keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat tersebut dalam penelitian ini dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar 1.1

Pola Hubungan Antarvariabel Penelitian

Sumber: Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*, hal. 299.

I. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 3 Bandung, yang beralamat di Jalan Belitung No. 8 Bandung. Pertimbangan memilih SMA Negeri 3 Bandung karena sekolah ini telah menerapkan program akselerasi, yaitu program percepatan belajar yang diaplikasikan dalam bentuk kelas akselerasi.

2. Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2011: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Sugiyono menyatakan (2011: 82) teknik *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas akselerasi SMA Negeri 3 Bandung dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sampel Penelitian

KELAS	JUMLAH SISWA
X-Akselerasi	19 siswa
XI-Akselerasi	19 siswa

Sumber: SMA Negeri 3 Bandung, tahun 2011.

Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



Rima Delianti, 2012

Kompetensi Kewarganegaraan Siswa...

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu